



**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Sarana & Prasarana

Rabu, 4 April 2018



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2018**

Daftar Isi

1. PEMERINTAH OPTIMISTIS SATU JUTA RUMAH TERBANGUN TAHUN INI (*Media Online Kompas*)
2. BI UPAYAKAN ALTERNATIF BIAYA INFRASTRUKTUR (*Media Online Media Indonesia*)
3. PERTAMINA BISA RAMPUNGAN KILANG Rp 412 T (*Media Online Suara Pembaruan*)
4. PENURUNAN STUNTING JADI PROYEK NASIONAL (*Media Online Suara Pembaruan*)

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Rabu

4 April 2018

Pemerintah Optimistis Satu Juta Rumah Terbangun Tahun Ini

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tetap optimistis, pembangunan satu juta unit rumah bisa tercapai pada 2018 ini. Sebab, kebutuhan akan rumah bagi masyarakat di Indonesia saat ini masih sangat tinggi.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia per tahun bisa mencapai angka 800.000 unit. Hal itu menjadi salah satu peluang bagi para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk lebih bersemangat dalam membangun rumah. Sebab, jika kebutuhan rumah tidak terpenuhi dengan baik, dikhawatirkan akan membuat kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan akan semakin meningkat.

Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat adalah dengan melaksanakan Program Satu Juta Rumah. Program tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional dan dilatarbelakangi tingginya backlog perumahan sekitar 11,6 juta unit rumah.

Sebagai tonggak dimulainya pelaksanaan program tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun mencanangkan pelaksanaan Program Satu Juta Rumah pada 29 April 2015 di Ungaran, Jawa Tengah, dan mendukungnya dengan keluarnya Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pada dasarnya, Program Satu Juta Rumah (PSR) merupakan

program yang diinisiasi oleh Pemerintah untuk terwujudnya percepatan penyelesaian hunian layak bagi masyarakat dalam rangka pengurangan backlog perumahan periode 2015-2019.

Maksud dilaksanakannya program tersebut adalah untuk mendorong stakeholder bidang perumahan (pemerintah, pemerintah daerah, pengembang, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat) untuk membangun satu juta unit rumah per tahun, baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun non-MBR. Pembangunan hunian yang termasuk dalam Program Satu Juta Rumah diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekitar 70 persen dan sisanya sekitar 30 persen untuk non-MBR. "Melalui program ini, diharapkan dapat terbangun satu juta unit rumah untuk masyarakat setiap tahunnya," ujar Direktur Jenderal Penyelidikan Perumahan Kementerian PUPR Khairi Anshid Hamid.

Menurut Khairi, saat ini tren pembangunan rumah baik itu rumah sederhana maupun rumah komersial oleh para pengembang perumahan maupun masyarakat terus meningkat. Adanya dukungan perundang-undangan dalam hal kemudahan perizinan pembangunan perumahan ikut membantu terhadap capaian

Program Satu Juta Rumah.

Sejak dicanangkan pada 2015 lalu, capaian program satu juta rumah terus bertambah setiap tahun. Pada 2015, jumlahnya sekitar 699.770 unit rumah, 2016 sebanyak 805.169 unit dan pada 2017 terus meningkat hingga mencapai 904.738 unit rumah. "Pemerintah optimistis satu juta rumah terbangun tahun ini" tandanya.

Pelaksanaan Program Satu Juta Rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah terdiri atas pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah khusus, dan rumah swadaya dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD, rumah umum oleh pengembang yang difasilitasi atau disubsidi lewat APBN melalui skema KPR Fasilitas Ekuitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga, dan bantuan uang muka, serta rumah yang dibangun pengembang tanpa subsidi.

Untuk mendukung Program Satu Juta Rumah di daerah, pemerintah pun memberikan stimulan bagi pemerintah daerah melalui dukungan penyelesaian sarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada perumahan MBR yang dibangun oleh pengembang, serta MBR calon korsumen perumahan untuk mengakses perumahan MBR melalui bantuan uang muka, FLPP,



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyelidikan Perumahan, membangun rumah khusus nelayan di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Loban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Pembangunan rumah khusus ini dimulai pada 29 Maret 2017 sampai dengan 23 Desember 2017.

dan subsidi selisih bunga.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi jitu, antara lain memberikan kemudahan perizinan, seperti Penerapan Inspeksi Nomor 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pembangunan Perumahan dan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR. Adanya inovasi dan penerapan teknologi dalam pembangunan rumah, seperti penggunaan teknologi baru antara lain melalui penggunaan metode RISHA dan

industrialisasi Prefabrikasi Pracet.

Selain itu, untuk meningkatkan pasokan rumah, pemerintah menggunakan tanah negara yang digunakan untuk pembangunan rumah (HGB di atas HPL), serta penyusunan regulasi dan deregulasi seperti Paket Kebijakan Ekonomi XIII, yakni konsep rumah murah untuk rakyat. Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2016 tentang DMB Gedung dan Permesolagi No 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi MBR di daerah. [ADV]

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat optimistis pembangunan satu juta rumah bisa tercapai pada 2018 ini. Sebab, kebutuhan akan rumah bagi masyarakat di Indonesia saat ini masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian PUPR, kebutuhan rumah per tahun bisa mencapai angka 800.000 unit. Hal itu menjadi salah satu peluang bagi para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk lebih bersemangat dalam membangun rumah. Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat adalah dengan melaksanakan Program Satu Juta Rumah. Program tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dilatarbelakangi tingginya backlog perumahan sekitar 11,6 juta unit rumah. Sebagai tonggak dimulainya pelaksanaan program tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencanangkan pelaksanaan Program Satu Juta Rumah pada 29 April 2015 di Ungaran, Jawa Tengah. Sebagai payung hukumnya, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Hashtag Berita :

#MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia #SatuJutaRumah #Pemukiman #APBN #KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat #PelaksanaanProyekNasional #Infrastruktur

BI Upayakan Alternatif Biaya Infrastruktur

MASIFNYA pembangunan infrastruktur kerap mendapat kritik lantaran menjadi salah satu pemicu membengkaknya utang pemerintah. Padahal, tak semua proyek tersebut didanai pinjaman dari luar negeri.

Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan terus memperdalam pasar keuangan agar bisa mendorong dan membantu pembiayaan sarana dan prasarana tersebut.

"Bagi infrastruktur yang memang bisa dibiayai secara komersial oleh swasta, itu bisa dibiayai dalam bentuk PPP atau penerbitan sekuritas seperti *earring back assets* sehingga dalam konteks ini bisa mengurangi beban fiskal maupun beban BUMN. Kami koordinasi itu untuk fokus ke sana," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih periode 2018-2023 Perry Warjiyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy Gubernur terpilih periode 2018-2023 Dody Budi Waluyo mengatakan beragam alternatif penempatan dana terus dikembangkan, termasuk meneruskan inisiatif yang telah dibuat untuk membiayai pembangunan. "Kita juga punya alternatif dana-dana yang ada di luar, misalnya, ataupun yang ada di domestik bisa ditempatkan ke instrumen-instrumen pembiayaan. Salah satu, misalnya, nanti bisa saja ada *project bond*. Itu juga alternatif dari pendalaman pasar keuangan," tutur Dody.

Pergerakan utang pemerintah dalam tiga tahun terakhir tumbuh rata-rata

"Bagi infrastruktur yang memang bisa dibiayai secara komersial oleh swasta, itu bisa dibiayai dalam bentuk PPP atau penerbitan sekuritas seperti *earring back assets*."

Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia

11%-14 % per tahun. Pada Februari 2018, posisi utang pemerintah menembus level Rp4.034,80 triliun.

Dalam diskusi yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) di Jakarta, kemarin, Direktur Strategis dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan Schneider Slahaan mengatakan, selain mengendalikan rasio utang pada level aman, pemerintah mengoptimalkan pembiayaan utang untuk kesinambungan fiskal. Pemanfaatan utang, kata dia, juga dipastikan untuk menyokong kegiatan produktif.

Dia mengungkapkan, pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja negara diarahkan pada pembangunan infrastruktur, berikut pembiayaan dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana desa, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. (Tes/Try/E-2)

BI UPAYAKAN ALTERNATIF BIAYA INFRASTRUKTUR

Masifnya pembangunan infrastruktur kerap mendapat kritik lantaran menjadi salah satu pemicu membengkaknya utang pemerintah. Padahal, tak semua proyek tersebut didanai pinjaman dari luar negeri. Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan terus memperdalam pasar keuangan agar bisa mendorong dan membantu pembiayaan sarana dan prasarana tersebut. Bagi infrastruktur yang memang bisa dibiayai secara komersial oleh swasta, itu bisa dibiayai dalam bentuk PPP atau penerbitan sekuritas seperti *earring back assets* sehingga dalam konteks ini bisa mengurangi beban fiskal maupun beban BUMN.

Hashtag Berita :

#PelaksanaanProyekNasional #BankIndonesia
#OtoritasJasaKeuangan #Infrastruktur
#PenyertaanModalDalamNegeri #PadatKarya
#MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomi
Indonesia #DanaAlokasiKhusus #BUMN

PERTAMINA BISA RAMPUNGKAN KILANG Rp 412 T

Harian Umum Sore MEMIHAK KEBENARAN

SIARA PEMBARUAN

Rabu BERITA SATU MEDIA HOLDINGS 4 April 2018

Pemerintah Bakal Tambah Tax Holiday

Pertamina Bisa Rampungkan Kilang Rp 412 T

JAKARTA Pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) hingga industri petrokimia menyambut baik aturan baru penambahan *tax holiday*, yang mencapai 20 tahun untuk investasi di atas Rp 30 triliun. Hal ini bisa mempercepat rampungnya proyek-proyek penting, seperti kilang PT Pertamina (Persero) yang nilainya sekitar US\$ 30 miliar atau Rp 412 triliun.

Pemerintah bakal merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memberikan pembebasan pajak penghasilan atau *tax holiday* 100% kepada 17 industri pionir. Aturannya yang sedang diberi nomor dan tinggal menunggu terbit ini menyebutkan, industri pionir yang bisa mengajukan insentif fiskal tersebut adalah industri logam dasar, pergilangan minyak, petrokimia berbasis migas, kimia dasar organik, kimia dasar anorganik, bahan baku farmasi, pembuatan semi konduktor dan komponen utama komputer, pembuatan komponen utama alat komandan, pembuatan utama alat kendali, pembuatan utama komponen motor listrik, pembuatan utama komponen mesin, pembuatan utama komponen robotik, pembuatan utama komponen kapal, pembuatan utama komponen pesawat, pembuatan utama komponen tenaga api, mesin pembangkit tenaga listrik, dan infrastruktur diominer.

Perinciannya, untuk investasi Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun bisa mendapatkan *tax holiday* lima tahun, dan untuk Rp 1-5 triliun dapat memperoleh *tax holiday* tujuh tahun. Selanjutnya, *tax holiday* diberikan semakin panjang sejalan dengan semakin besarnya investasi, yakni 10 tahun untuk investasi Rp 5-15 triliun, 15 tahun untuk investa-

si Rp 15-30 triliun, dan mencapai 20 tahun untuk proyek dengan investasi di atas Rp 30 triliun. Di samping itu, tingkat pengurangan pajaknya kini dipukul rata 100%.

Selanjutnya pada ketentuan sebelumnya –Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan–, *tax holiday* diberikan selama lima hingga 15 tahun dan diperpanjang hingga 20 tahun sesuai diskresi menkeu. Selain itu, persentase pengurangan pajak berbeda-beda, di rentang 10% hingga 100%.

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Arif Budiman mengungkapkan, pihaknya menyambut ba-

ik rencana perubahan PMK yang memberikan insentif berupa *tax holiday* tersebut. Pasalnya, beleid ini bakal memudahkan perseroan dalam merampungkan proyek-proyek kilangnya.

Proyek infrastruktur kilang adalah megaprojek yang capex-nya (capital expenditure/belanja modal) sangat besar ditambah risiko yang cukup tinggi. Dengan adanya *tax holiday* ini keekonomiannya dapat lebih terjaga," kata dia dalam pesan pendek, di Jakarta, Selasa (3/4).

Pertamina kini mengerjakan enam proyek kilang sekaligus, baik unit baru maupun peningkatan kapasitas dan kualitas dari kilang yang ada. Dana yang dibutuhkan untuk

merampungkan proyek ini sangat besar, yakni US\$ 30 miliar. Rinciannya, Kilang Balongan membutuhkan dana US\$ 1,27 miliar, Kilang Balikpapan US\$ 4,6 miliar, Kilang Cilacap US\$ 4,5 miliar, Kilang Tuban sekitar US\$ 13 miliar, dan Kilang Bontang US\$ 8 miliar. Hingga investasi ini belum termasuk proyek Kilang Balongan, Jawa Barat dan Kilang Dumai, Riau.

Selain merevisi ketentuan mengenai *tax holiday* yang saat ini berdasarkan PMK Nomor 159 Tahun 2015, pemerintah juga akan merevisi *tax allowance*. *Tax allowance* saat ini diberikan kepada lebih dari 140 sektor usaha dengan persyaratan tertentu, berdasarkan Peraturan

Pemerintah (PP) No 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Tax allowance ini merupakan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud –termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha– dan komposisi kegiatan yang lebih lama dari 5 tahun. Sedangkan berdasarkan PMK Nomor 159 Tahun 2015, *tax holiday* merupakan pengurangan atau pembebasan pajak secara sementara yang diberikan kepada perusahaan yang baru dibangun, dengan pengurangan pajak penghasilan (PPH) badan diberikan paling banyak 100% dan paling sedikit 10% dari jumlah PPh badan yang tertunggak.

Tambah Kesempatan
Pada kesempatan terpisah, Vice President Corporate Relations PT Chandra Asean Sehat Miyarso mengatakan, perubahan petrokimia ini sudah siap-siap mengajukan *tax holiday* untuk proyek terburunya, yakni pengalihan nafu dengan kapasitas 1 juta ton. Ia berharap aturan baru tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai yang tertulis dan mendorong investor masuk.

"Kami sedang siapkan untuk bisa mengajukan *tax holiday*, kalau yang sudah ada izimnya sekitar Rp 20 triliun, jadi bisa dapat 15 tahun. Sebetulnya kan investasinya bisa sampai US\$ 5 miliar, tetapi yang kita terapkan baru tahap pertama US\$ 1,95 miliar atau Rp 26 triliun," kata Sehat. (IDM-6)



Kilang Cilacap, Jawa Tengah.

Pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) hingga industri petrokimia menyambut baik aturan baru penambahan tax holiday, yang mencapai 20 tahun untuk investasi di atas Rp 30 triliun. Hal ini bisa mempercepat rampungnya proyek-proyek penting, seperti kilang PT Pertamina (Persero) yang nilainya sekitar US\$ 30 miliar atau Rp 412 triliun. Pemerintah bakal merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memberikan pembebasan pajak penghasilan atau tax holiday 100% kepada 17 industri pionir. Selanjutnya, tax holiday diberikan semakin panjang sejalan dengan semakin besarnya investasi, yakni 10 tahun untuk investasi Rp 5-15 triliun, 15 tahun untuk investasi Rp 15-30 triliun, dan mencapai 20 tahun untuk proyek dengan investasi di atas Rp 30 triliun. Di samping itu, tingkat pengurangan pajaknya kini dipukul rata 100%. Sedangkan pada ketentuan sebelumnya –Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan–, tax holiday diberikan selama lima hingga 15 tahun dan diperpanjang hingga 20 tahun sesuai diskresi menkeu. Selain itu, persentase pengurangan pajak berbeda-beda, di rentang 10% hingga 100%. PT Pertamina (Persero) mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana penerbitan PMK yang memberikan insentif berupa tax holiday tersebut. Pasalnya, beleid ini bakal memudahkan perseroan dalam merampungkan proyek-proyek kilangnya. Proyek infrastruktur kilang adalah megaprojek yang capex-nya (capital expenditure/belanja modal) sangat besar ditambah risiko yang cukup tinggi. Dengan adanya tax holiday ini keekonomiannya dapat lebih terjaga

Hashtag Berita :

#PelaksanaanProyekNasional #KilangMinyak #KementerianEnergidanSDM #PT.Pertamina #Infrastruktur #DuniaUsaha #PelakuIndustri #Perminyakan #KedaulatanEnergiNasional

SUARA PEMBARUAN

Rabu

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS

4 April 2018

Penurunan *Stunting* Jadi Proyek Nasional

[JAKARTA] Kementerian PPN/Bappenas mencatat 9 juta anak mengalami *stunting* yang tersebar di pedesaan maupun perkotaan. Dari sisi ekonomi, apabila terus dibiarkan *stunting* dapat merugikan ekonomi Indonesia. Diperkirakan, *stunting* dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3% dari produk domestik bruto (PDB) per tahun.

"Jika PDB negara kita Rp 13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat *stunting* dapat mencapai Rp 300 triliun per tahun. Besarnya potensi ancaman *stunting*, mendorong

pemerintah sejak awal berkomitmen penuh dan serius menangani permasalahan *stunting*," ujarnya.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro, dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menargetkan penurunan *stunting* pada anak usia di bawah dua tahun dari 32,9% pada 2013 menjadi 28% pada 2019, sementara di dalam RKP 2018 pemerintah telah menjadikan penurunan *stunting* sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional.

"Dengan komitmen seperti itu, diharapkan SDM

Indonesia mampu bersaing di era ekonomi digital yang memerlukan penguasaan teknologi dan *skill* yang tinggi, serta memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi," tutur Bambang.

Saat ini, kondisi *stunting* pada balita Indonesia terjadi secara luas, tetapi dengan disparitas yang tinggi. Pemerintah menetapkan 100 kabupaten prioritas untuk pengurangan angka *stunting*. Selanjutnya, ada 200 kabupaten lagi yang akan ditangani. *Stunting* tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah dengan jumlah mencapai 16,9% dan terendah ada di

Sumatera Utara dengan 7,2%.

Secara nasional, *stunting* rata-rata terjadi hingga 10,2%. Baca: Lima Langkah Pemerintah Atasi Ketimpangan Sosial. Selain itu, ada juga kejadian *wasting* (bertubuh kurus) yang secara nasional mencapai angka 12,1%. Sementara, saat hamil banyak ibu hamil di Indonesia yang mengalami anemia dengan angka yang mencapai 37,1%.

Kementerian PPN/Bappenas mencatat, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi, berdasarkan *Global Nutrition Report* pada 2014. [Ant/L-9]

Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas mencatat 9 juta anak mengalami *stunting* yang tersebar di pedesaan maupun perkotaan. Dari sisi ekonomi, apabila terus dibiarkan *stunting* dapat merugikan ekonomi Indonesia. Diperkirakan, *stunting* dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3% dari produk domestik bruto (PDB) per tahun. Jika PDB negara kita Rp 13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat *stunting* dapat mencapai Rp 300 triliun per tahun. Besarnya potensi ancaman *stunting*, mendorong pemerintah sejak awal berkomitmen penuh dan serius menangani permasalahan *stunting*. Menurut Kementerian PPN/Bappenas, dalam RPJMN 2015 - 2019 , pemerintah telah menargetkan penurunan *stunting* pada anak usia di bawah dua tahun dari 32,9% pada 2013 menjadi 28% pada 2019, sementara di dalam RKP 2018 pemerintah telah menjadikan penurunan *stunting* sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional

#MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia

#RPJMN

#RKP

#KesenjanganSosial #APBN #KementerianPPN/Bappenas

#PelaksanaanProyekNasional

#Infrastruktur